

Tantangan Pancasila dalam Tafsir Kosmopolitanisme

by Najamuddin Khairur Rijal

Submission date: 25-Jan-2019 09:22PM (UTC-0800)

Submission ID: 1068727372

File name: Naskah_Naja-Pancasila.pdf (538.11K)

Word count: 4402

Character count: 29931

Tantangan Pancasila dalam Tafsir Kosmopolitanisme

Oleh : Najamuddin Khairur Rijal

Pancasila sebagai dasar negara sejatinya mengandung nilai-nilai ideal kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme sendiri merupakan sebuah cara pandang yang menempatkan manusia pada posisi yang sama dan setara, sekalipun masing-masing manusia berbeda dan beragam. Namun dalam perkembangannya, nilai kosmopolitanisme Pancasila tersebut menemui tantangan dalam ruang implementasinya. Terlebih lagi, “keterbukaan” sebagai konsekuensi dari era globalisasi memberikan banyak celah bagi praktik-praktik yang tidak sejalan dengan muatan substantif nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Era globalisasi, misalnya, membawa konsekuensi liberalisasi ekonomi yang selanjutnya memungkinkan masuknya berbagai investasi dan perusahaan asing. Alih-alih membawa kemakmuran sebagaimana janji liberalisme, perusahaan asing tersebut justru menjadikan harapan kesejahteraan rakyat kian senjang. Hal ini karena kekayaan alam yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat justru dinikmati oleh sekelompok orang pemilik kuasa modal. Celakanya, kemudian diperparah dengan realitas politik transaksional antara elit politik dan pemilik modal untuk memuluskan upaya penguasaan kekayaan negara untuk kepentingan segelintir orang. Realitas ini jelas bertentangan dengan butir-butir nilai Pancasila.

Tulisan ini selanjutnya mengeksplorasi, pertama, bahwa dinamika sejarah Pancasila adalah dinamika tentang perdebatan hubungan antara agama dan negara yang melahirkan konsensus

tanpa adanya dominasi agama mayoritas, yang selanjutnya menunjukkan bahwa kesederajatan agama dalam negara adalah nilai kosmopolitan. Kedua, tafsir lima butir sila dalam Pancasila adalah sebangun dengan nilai-nilai kosmopolitanisme yang mengedepankan kesetaraan warga negara sebagai manusia yang sama. Ketiga, sebagai telaah kritis, dalam praktiknya nilai-nilai kosmopolitanisme itu menunjukkan kecenderungan ke arah komunitarianisme. Artinya, ada ruang kosong antara tafsir normatif Pancasila dengan wujud praktiknya. Ruang kosong inilah yang menjadikan Pancasila pada posisi yang paradoks, yakni mengandung nilai kosmopolitan tetapi dipraktikkan secara komunitarian, yang muaranya menjadi tantangan tersendiri bagi nalar ke-Indonesia-an kita.

KOSMOPOLITANISME VI

Sebelum mencandra Pancasila dalam tafsir kosmopolitanisme, ada baiknya konsepsi kosmopolitanisme perlu dibahas. Dalam tataran akademis, kosmopolitanisme berawal dari pandangan Diogenes of Sinope yang melihat bahwa manusia adalah bagian dari dunia, *citizen of the world*. Secara harfiah, kosmopolitanisme (*cosmopolitanism*) berasal dari kata *cosmos* yang berarti *universe* atau *world*, dan *polis* atau *polites* yang berarti *city* atau *citizen* (Gannaway, 2009). Kosmopolitanisme secara sederhana dapat dimaknai sebagai *citizen of the world* atau *citizen of the universe*. Kalimat yang terkenal dari Diogenes untuk menggambarkan gagasan itu adalah “*I am the citizen of the world.*”

Pheng Cheah (2006) mengutip ensiklopedia yang ditulis Diderot dan d’Alembert mengemukakan bahwa kosmopolitanisme merujuk pada,

“un homme qui n’a point de demeure fixe, ou bien un homme qui n’est étranger nulle part (a man without a fixed abode, or better, a man who is nowhere a stranger).”

Kira-kira, maknanya adalah manusia yang bisa hidup dan tinggal di manapun, karena di manapun berada ia bukanlah orang yang asing dan terasing sebab semua manusia pada hakikatnya sama.

Kosmopolitanisme juga sering dianalogikan sebagai *salad bowl*, seperti salad buah dalam suatu wadah. *Salad bowl* dipahami sebagai wadah atau media di mana setiap identitas yang bersumber dari ras, suku, agama, budaya, kenegaraan, dan lainnya dapat mempertahankan karakteristiknya masing-masing tanpa menjadi homogen. Semua identitas kultural, sosial, politik, dan lainnya berbaur menjadi satu tanpa masing-masing pihak harus melebur dalam keseragaman (homogenisasi) dan meninggalkan serta menanggalkan identitasnya yang melekat.

Lebih lanjut, menurut Ulf Hannerz (2006), kosmopolitanisme bisa muncul dalam dua manifestasi (*two face*), yakni secara kultural dan politik. Secara kultural, kosmopolitanisme terwujud sebagai sebuah sikap yang terbuka terhadap perbedaan budaya dan sebuah kemampuan untuk menyatu dengan budaya lain, perbedaan bukanlah hal yang perlu dipertentangkan. Secara politik, kosmopolitanisme merupakan sebuah upaya untuk mengubah tatanan yang memungkinkan realisasi gagasan bahwa semua manusia sama dan setara. Kesadaran kosmopolitanisme itu kemudian akan membangun prinsip moral kemanusiaan bahwa manusia sebagai “*a community of citizens of the world*”.

Dalam konteks budaya, menurut Hannerz (2006), kosmopolitanisme memungkinkan terjadinya hibridisasi budaya. Hibridisasi berarti terjadinya percampuran dua atau lebih entitas tetapi tidak menghilangkan unsur asli dari masing-masing bagian (Rowe dan Schelling, 1991 dalam Pieterze, 2009). Karena itu, bagi Hannerz (2006), sikap kosmopolitan merupakan sesuatu yang *happy face* dan *positive view* dengan bisa menikmati berbagai hal dan bergabung dengan orang lain dalam keragaman latar belakang. Sikap itu bisa lahir melalui pendidikan, *travelling*, pernikahan, pertukaran pelajar, dan sumber-sumber material yang memungkinkan siapa pun memperoleh pengetahuan tentang keberagaman.

Selanjutnya, Griffiths dkk (2008) mengelaborasi tiga konsep kosmopolitanisme. Pertama, kosmopolitanisme merujuk pada kondisi sosiokultural, menuju pada apa yang disebut sebagai *cosmopolitan world*. *Cosmopolitan world* memungkinkan keterbukaan budaya di mana setiap orang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain tanpa adanya batas-batas kultural. Kedua, kosmopolitanisme sebagai ideologi atau falsafah yang mendorong gagasan *citizen of the world*. Kosmopolitanisme menciptakan masyarakat di seluruh dunia yang memiliki komitmen atas kemanusiaan menuju pada implementasi hak-hak asasi manusia yang universal. Ketiga, kosmopolitanisme digunakan sebagai proyek politik yang mendorong terwujudnya *global governance* melalui *cosmopolitan democracy*, menuju terbentuknya tata dunia baru.

Secara sederhana, berdasarkan pemahaman penulis, kosmopolitanisme mengandung nilai-nilai ideal dalam kehidupan manusia yang berbasis universalitas. Kosmopolitanisme antara lain menekankan prinsip kesetaraan dan persamaan derajat antarmanusia, keterbukaan dan toleransi atas perbedaan latar belakang, keadilan dan perwujudan hak-hak asasi manusia yang universal, serta ketiadaan sekat dan batas identitas karena semua manusia adalah masyarakat dunia yang memiliki posisi yang sederajat.

Bertolak belakang dengan itu, kosmopolitanisme bertentangan dengan komunitarianisme yang menekankan pada *the origin of identity*. Menurut Griffiths dkk (2008), komunitarianisme mengajukan kritik terhadap liberalisme dan kosmopolitanisme melalui empat hal. Pertama, ide-ide kosmopolitanisme mengingkari hakikat *human being* dengan meniadakan kebebasan untuk memilih nilai-nilai yang dianut dan komunitas di mana manusia ingin hidup. Kedua, kosmopolitanisme merepresentasikan bentuk *asocial individualism* yang gagal memahami identitas manusia sebagai bagian dari komunitas. Ketiga, komunitarianisme mempertanyakan prinsip universalisme, di mana menurutnya tidak ada keadilan yang dapat diaplikasikan secara universal dan *cross-cultural*. Keempat, komunitarianisme menolak prioritas

moral dari kosmopolitanisme yang memberikan kebebasan *individual choice*.

Mencermati uraian di atas, dipahami bahwa komunitarianisme berposisi dengan konsepsi kosmopolitanisme. Jika kosmopolitanisme bersifat universalitas, maka komunitarianisme bersifat komunalitas. Kosmopolitanisme mengabaikan perbedaan dengan memposisikan manusia sama dan setara, sementara komunitarianisme menekankan identitas komunal yang melekat pada masing-masing manusia yang membedakannya dengan manusia lain yang tak dapat disatukan dan disamakan.

Dalam konteks tulisan ini, sejatinya Pancasila dalam tafsirnya mengusung nilai kosmopolitan. Namun dalam ranah praktis, beberapa implementasinya terlukis makna komunitarian. Namun, sebelum membincangkannya lebih lanjut, Pancasila dalam lintasan sejarah dan dinamikanya perlu dibahas.

SEJARAH DAN DINI

Pancasila secara harfiah dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu *panca* yang berarti lima, dan *sila* yang berarti dasar. Rangkaian kata tersebut mempunyai makna “lima dasar”. Istilah *sila* juga dapat diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun); akhlak dan moral (Marsudi, 2006). Istilah Pancasila sendiri dikenal sejak masa kerajaan Majapahit melalui tulisan Empu Prapanca tentang *Negara Kertagama* dan Empu Tantular dalam karyanya *Sutasoma*.

Selanjutnya, sebagai dasar negara, Pancasila tidaklah lahir dalam ruang hampa, melainkan melalui proses panjang dan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa serta dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Sejatinya, Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia. Proses sejarah konseptualisasi Pancasila setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis

antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*) (MPR, 2012). Namun demikian, perumusan konseptualisasi Pancasila barulah dimulai pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia melalui persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni 1945.

Soekarno, dalam rangkaian rapat tersebut, pada tanggal 1 Juni 1945 menawarkan Lima Asas Negara Indonesia yaitu kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan tersebut kemudian digodok dan fase pengesahan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dilakukan pada 18 Agustus 1945 (MPR, 2012). Dalam perkembangannya, akhirnya lima prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila disusun menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan. Momentum 1 Juni selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.

Rumusan Pancasila itu tertuang dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diberi nama dengan Mukaddimah atau dikenal pula dengan Piagam Jakarta. Dalam perkembangannya, Piagam Jakarta mengalami perubahan terutama menyangkut pada dasar ketuhanan. Tujuh kata dalam bagian akhir piagam tersebut yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," dihapus dan diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Penghapusan kalimat tersebut menunjukkan bahwa para *founding fathers* menyadari keragaman agama yang ada di Indonesia sehingga agama Islam sekalipun menjadi agama mayoritas, tidak untuk dijadikan sebagai dasar dari sebuah negara yang terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Pada Lima Asas Negara yang dikemukakan Soekarno di atas juga tampak bahwa asas yang terkait agama diletakkan pada nomor lima, sedangkan asas kebangsaan adalah pertama dan utama (Maarif, 1996 dalam Rachman, 2011).

Penghapusan kalimat yang merepresentasikan hanya satu agama tersebut menunjukkan bahwa Pancasila merupakan karya bersama yang lahir melalui konsensus dan merupakan titik temu (*common denominator*) yang menyatukan keindonesiaan (MPR, 2012). Kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu, tetapi menegaskan bahwa agama-agama yang ada berintikan satu Tuhan, yaitu Yang Maha Esa (Rachman, 2011). Hal ini bermakna bahwa setiap agama dan kepercayaan yang diyakini oleh warga negara adalah sama dan setara, ini sejalan pula dengan nilai kosmopolitanisme yang dibahas di awal tulisan ini.

Pertanyaannya kemudian adalah sejak kapan Pancasila mengalami ideologisasi, yakni berkembang menjadi ideologi negara? Ideologi negara dalam arti menjadi dasar dari segala aturan, cita-cita, dan semangat kehidupan bernegara Indonesia. Pertanyaan itu menjadi penting karena menurut Onghokham dan Andi Achdian (dalam Nasution dan Agustinus, 2006), Pancasila tidak lebih dari suatu kontrak sosial (*social contract*). Disebut kontrak sosial karena pada dasarnya Pancasila adalah hasil konsensus atas sengitnya perdebatan dan negosiasi di dalam BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka. Menurut kedua sejarawan Universitas Indonesia itu, Pancasila sebagai ideologi negara bersifat komprehensif barulah berkembang pada awal dekade 1960-an

Perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara diidentifikasi secara lugas oleh As'ad Said Ali. Said Ali dalam *Negara Pancasila* (2009) menerangkan bahwa pada dekade 1950-an muncul inisiatif untuk melakukan interpretasi terhadap Pancasila sehingga melahirkan dua kubu. Pertama, kubu yang berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekadar kompromi politik atau kontrak sosial, melainkan sebuah filsafat sosial atau *weltanschauung* bangsa. Kedua, kubu yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Saat itu, Pancasila merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis-sekuler dengan nasionalis-Islam mengenai dasar negara. Sebagai kompromi politik, maka

tidak tepat apabila Pancasila ditempatkan sebagai asas politik, filsafat politik, ideologi politik, dan bentuk lainnya.

Said Ali (2009) kemudian mencoba menyintesis pandangan tersebut dengan meletakkan Pancasila menurut fungsinya sebagai dasar negara, konsensus dasar, identitas kultural, dan visi bangsa yang saling mengait satu dengan lainnya. Senada dengan itu, Marsudi (2006) memposisikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, falsafah hidup, ideologi nasional. Pada dasarnya, Pancasila sepenuhnya telah menjadi ideologi yang komprehensif, di mana Pancasila adalah jiwa dan kepribadian, Pancasila adalah pandangan hidup, Pancasila adalah tujuan, Pancasila adalah perjanjian luhur, Pancasila adalah dasar negara, dan seterusnya (Setneg RI, 1986 dalam Said Ali, 2009).

Selanjutnya, gagasan Soekarno menjadikan Manipol/USDEK sebagai tafsir resmi Pancasila menandai dijadikannya Pancasila sebagai ideologi negara yang bersifat resmi dan tunggal. Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manifestasi Politik (Manipol) UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

Lebih lanjut, pada masa Orde Baru, penempatan Pancasila sebagai ideologi negara semakin kuat dengan Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dari seluruh kehidupan bernegara melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Menurut Said Ali (2009), Pancasila era Orde Baru diradikalisasi secara lebih mendalam dan ditempatkan sebagai ideologi, jati diri dan *welstanchauung* bangsa, jaminan kesejahteraan, dan lain-lain. Pancasila selama Orde Baru ditransformasi menjadi suatu konstruksi gagasan yang utuh dan berfungsi sebagai ideologi negara yang resmi dan mutlak serta memiliki kebenaran tunggal atau monointerpretasi. Kedudukan Pancasila sebagai asas dan ideologi negara semakin diperkuat dengan ditetapkannya 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

TAFSIR KOSMOPOLITANI

Terlepas dari dinamika di atas, satu hal yang pasti bahwa Pancasila adalah jiwa kenegaraan dan kebangsaan Indonesia yang menjadi dasar dari segala tata aturan kehidupan bernegara. Lebih dari itu, nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan Pancasila mengandung prinsip kosmopolitanisme. Sebagaimana dipahami bersama, semangat yang melandasi konsepsi dan cita-cita bangsa Indonesia terangkum dalam lima prinsip utama yang tertuang dalam Pancasila: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu mengandung aspek personal hingga aspek sosial. Nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila memuat nilai spiritualitas, humanitas, pluralitas, konsensus, dan kemasyarakatan yang kurang lebih sejalan dengan gagasan kosmopolitanisme.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara mengakui adanya Tuhan. Olehnya, setiap orang dapat menyembah Tuhan-nya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Dengan demikian, segenap agama dan pemeluk agama yang ada di Indonesia (seharusnya) mendapat tempat dan perlakuan yang sama dari negara dalam perwujudan peribadatan kepercayaan dan keyakinan setiap warga negara. Sila pertama ini menekankan fundamen etis-religius dari negara Indonesia yang bersumber pada moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan (MPR, 2012).

Dalam konsepsi yang demikian, negara tidak mewakili agama tertentu, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanan setiap warga negara dalam melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. Dalam kaitannya dengan itu, menurut Dawan Rahardjo (1993) dalam Rachman (2011), Pancasila mengandung unsur “sekularis”. Artinya, Indonesia bukanlah negara teokrasi, tetapi

negara bersikap positif terhadap agama di mana negara menjamin kebebasan beragama dan memberi kemudahan untuk kegiatan keagamaan serta tidak mencampuri urusan agama. Pengejawantahan sila pertama tersebut juga mengandung makna bahwa negara harus menjamin tegaknya toleransi antar umat beragama yang berkeadaban. Sila pertama ini salah satunya tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menegaskan bahwa Indonesia berada dalam lingkungan bangsa-bangsa, di mana manusia memiliki hakikat hak-hak fundamental dan martabat yang sama dan setara di seluruh bangsa dan negara. Prinsip internasionalisme dan kebangsaan Indonesia adalah internasionalisme yang berakar di dalam buminya nasionalisme, dan nasionalisme yang hidup dalam taman sarnya internasionalisme (MPR, 2012). Secara inheren, sila tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal. Karena itu, nilai-nilai universal dalam wacana kemanusiaan harus dijunjung tinggi setinggi-tingginya.

Hal itu selanjutnya dituangkan, salah satunya, dalam Pasal 18 A sampai 18 J UUD 1945 yang memuat prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal. Melalui term “kemanusiaan yang adil dan beradab,” maka setiap warga negara (manusia) mempunyai kedudukan yang sama dan setara, tanpa adanya diskriminasi berbasis ras, agama, suku, budaya, sosial, dan lainnya. Jadi, berdasarkan sila kedua, kebangsaan yang dikembangkan Indonesia bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme* (mengagungkan kesukuan atau kedaerahan), melainkan kebangsaan yang menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa (MPR, 2012). Nilai-nilai kemanusiaan universal itu hanya bermakna jika bisa diinternalisasikan dalam konteks partikularitas bangsa-bangsa yang bersifat heterogen.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki kehendak untuk bersatu. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan lainnya (MPR, 2012). Persatuan Indonesia adalah persatuan kebangsaan yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia. Pada titik ini, nilai heterogenitas, kemajemukan, multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman perbedaan yang ada di seluruh Indonesia menjadi satu. Hal itu antara lain tertuang dalam Pasal 1, 18, dan 32 UUD 1945.

Penting untuk ditegaskan bahwa “bersatu” atau “satu” dalam konteks ini tidak bermakna bahwa semua itu melebur atau terjadi homogenisasi dari segala aspek yang beragam. Melainkan, “bersatu” atau “satu” dalam definisi sila ketiga adalah persatuan sebagai bangunan utuh tanpa menghilangkan perbedaan yang ada (*unity in diversity*). Perbedaan yang ada merupakan kekayaan bangsa Indonesia, dan karena itu perbedaan itu bukan untuk dilebur, tetapi untuk bisa menjadi satu kesatuan yang berwarna-warni, di mana masing-masing perbedaan itu berjalan beriringan secara seimbang. Sejalan dengan itu, konsepsi tentang itu dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu.

Lebih dari itu, Indonesia sendiri menganut bentuk Negara Kesatuan yang sifatnya mutlak dan tidak bisa berubah. Konsep itu tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Bangunan Negara Kesatuan itu tidak dapat diubah sekalipun UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Sebab, Negara Kesatuan adalah bentuk yang telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewujudkan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk.

Untuk itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang memiliki kesatuan teritorial dari

Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Satu kesatuan bangsa yang disebut bangsa Indonesia. Atas dasar itu pula, Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyebut bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri, yang diatur dengan undang-undang.” NKRI, dalam pasal di atas, dinyatakan *dibagi atas*, bukan *terdiri atas*. Kata “dibagi atas” menunjukkan bahwa NKRI tersebut adalah satu, setelah itu baru kemudian dibagi atas daerah-daerah. Sehingga, Negara Kesatuan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Meskipun NKRI sudah dibagi, ia tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Sila di atas menunjukkan cita-cita pemuliaan kedaulatan rakyat dengan semangat emansipasi dan egalitarianisme. Cita-cita kerakyatan tersebut hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan (MPR, 2012). Lebih jauh dari itu, prinsip permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Asas kerakyatan juga menganut manifestasi bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam demokrasi permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna substantifnya sejauh tidak disertai dengan kesederajatan dan semangat kekeluargaan dari perbedaan aneka gugus kebangsaan. Sila ini juga mempertegas bahwa asas tata pemerintahan Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat. Implementasi sila keempat tersebut dalam UUD 1945 tertuang dalam pasal-pasal tentang kedaulatan rakyat, pemilihan umum, DPR, dan MPR antara lain Pasal 1, 2, 3, 5, 20, 28, dan 37.

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima mengisyaratkan pentingnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi semua warga negara. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam Pancasila tidak sama dengan prinsip komunisme yang menekankan kolektivisme dan juga berbeda dengan liberalisme yang menekankan individualisme (MPR, 2012).

Keadilan sosial bermakna setiap warga negara punya posisi yang sama dan setara untuk merasa dan diperlakukan secara adil tanpa perbedaan. Setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati kekayaan ekonomi negara dengan tidak ada kecualinya. Keadilan sosial ini berlaku di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat. Prinsip keadilan ini adalah inti moral dari ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai yang berkaitan dengan sila kelima antara lain ditemukan dalam Pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34 UUD 1945.

Kelima sila yang dijabarkan di atas pada hakikatnya didasarkan pada prinsip kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kelima prinsip tersebut dikembangkan dengan semangat gotong-royong, yakni semangat kebersamaan dan kekeluargaan tanpa memandang perbedaan latar belakang apapun, sama seperti nilai dari gagasan kosmopolitan. Sebagaimana menurut Soekarno (dalam Rachman, 2011), Pancasila bisa diperas menjadi satu sila saja yaitu gotong-royong.

Dalam Pancasila, prinsip ketuhanan adalah ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang, dan toleran. Bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip kemanusiaan yang universal, berkeadilan, dan berkeadaban. Bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah, menindas, dan eksploitatif. Prinsip persatuan dengan tetap menghargai perbedaan. Bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan ataupun menolak persatuan. Prinsip demokrasi dengan

mengembangkan musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-pemodal. Prinsip keadilan dengan mengembangkan partisipasi dan emansipasi dengan semangat kekeluargaan. Bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu (MPR, 2012).

Lebih lanjut, menurut Chang (Haq dalam Hidayat, 2014), Pancasila merupakan roh kebangsaan yang bersifat inklusif, merangkul semua golongan sosial, etnis, agama, bahasa, dan aspirasi hidup. Nilai yang paling dasar terkandung di dalamnya yakni keluhuran martabat manusia. Sebagai falsafah negara, Pancasila mengayomi kebhinnekaan sehingga memberikan ruang yang sama kepada semua pihak untuk memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sesuai nurani kebangsaannya.

REALITAS I

Jika mencermati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, perlu ditegaskan kembali bahwa sejatinya Pancasila sungguh mengedepankan nilai-nilai kosmopolitanisme, bukan komunitarianisme. Sekalipun masyarakat Indonesia majemuk, tetapi nilai-nilai Pancasila itu mendorong identitas yang multikultur dalam sebuah ruang toleransi, persis seperti dengan *salad bowl*. Meskipun membangun masyarakat yang sederajat dengan multikultural yang Indonesia miliki tidak mudah, namun hakikat dan semangat dalam Pancasila secara ideal menunjukkan adanya hasrat tersebut (Malik dan Djaeng, 2009).

Selain sebagai pandangan hidup dan dasar negara serta ideologi nasional, Pancasila juga berfungsi sebagai ikatan budaya yang mampu menyatukan warga negara Indonesia yang plural. Namun, bisa jadi bahkan sangat mungkin, nilai-nilai ideal kosmopolitan dalam Pancasila tersebut hanya pada tataran normatif. Berbicara mengenai Pancasila jangan-jangan ibarat berbicara di menara gading. Semua orang tahu mengenai makna Pancasila, tapi aktualisasi dalam realitasnya tidak ada.

Dalam tataran praktik, implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam banyak hal justru lebih mengarah pada komunitarianisme. Sila pertama berbicara tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, namun alih-alih menempatkan setiap agama dan kepercayaan bersama pemeluknya secara adil, yang terjadi justru adanya tirani mayoritas. Dewasa ini ide-ide dan gerakan terwujudnya negara yang didasarkan pada agama mayoritas kian mendapat tempat, menjamur dalam berbagai diskursus, tampak dalam berbagai kesempatan, bahkan hadir dalam setiap kritik terhadap negara.

Mereka yang dimaksudkan di atas mendambakan sebuah negara yang teduh dalam payung agama mayoritas, sementara agama yang lain dipandang bukanlah pemilik rumah keindonesiaan. Hal ini menjadikan pemeluk agama lain merasakan ketidaknyamanan dalam rumah Indonesia. Selain itu, aliran agama yang berbeda dengan *mainstream* dan kepercayaan lokal (*indigenous belief*) tidak mendapat tempat di ruang publik. Kelompok-kelompok keagamaan di luar kelompok *mainstream* yang diakui negara mendapatkan perlakuan diskriminatif hanya karena penafsiran keagamaan dan keyakinan kebertuhanan mereka berbeda dengan yang arus utama.

Pada sila kedua, kemanusiaan kian tergerus dengan banyaknya masalah hak dan kewajiban kemanusiaan pada rentang interval dikotomis stratifikasi (Tumanggor dkk, 2010). Kaya-miskin masih menganga jurang pemisahannya. Karena yang miskin tak berdaya akibat tidak punya akses yang sama dengan si kaya, nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaannya terampas. Pengadilan menjadi tidak sejalan dengan naluri kemanusiaan tetapi atas kuasa modal dan jabatan. Pengadilan seperti *bamboo penugal lading* (tumpul ke atas, runcing ke bawah). Nilai kemanusiaan terseret oleh ketidakpedulian sosial hanya karena perbedaan derajat, kepentingan, afiliasi, dan latar belakang sosial, agama, dan etnisitas.

Sila ketiga, persatuan Indonesia kian terancam dengan hadirnya fanatisme yang berlebihan atas agama, kesukuan, dan etnisitas. Beriring dengan fanatisme itu muncul wacana dan

gerakan pemisahan dari politik kesatuan. Persatuan Indonesia tercabik-cabik oleh perbedaan kelompok dan golongan dalam perebutan kekuasaan politik. Alih-alih bersatu untuk membela negara dan nasionalisme, yang terjadi justru kita retak hanya karena perbedaan kepentingan dan afiliasi kelompok. Rumah Indonesia dirasa tidak menjadi rumah yang aman dan nyaman karena egoisme komunitarian yang berlebihan.

Pada sila keempat, kedaulatan rakyat dengan dasar permusyawaratan dan perwakilan menjadi berantakan dengan dipertontonkannya mental-mental brutal dan ekstrem dalam sidang-sidang legislatif dalam rangka merebut kursi kekuasaan. Politik transaksional menjadi utama dalam upaya memuluskan kepentingan kelompok atau golongan, sementara kedaulatan rakyat menjadi tak punya daya kuasa karena suara rakyat dijual atas nama modal, keuntungan, dan kekuasaan sepihak dari golongan tertentu. Kita menjadi jamak menyaksikan tatkala kepentingan dan suara hati rakyat memental karena perwakilan rakyat hanya memperjuangkan komunalitasnya (kelompok dan golongannya).

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat semakin jauh panggang dari api tatkala pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya tidak berorientasi kebutuhan rakyat secara sederhana dan menyeluruh, tetapi pada kepentingan komunal. Porsi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat lebih kecil dari biaya upacara seremonial kedinasan dan even-even suka-duka pejabat. Begitu juga pada pemanfaatan segala apa yang ada di atas dan di bawah tanah Indonesia yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang punya akses politik dan ekonomi untuk mengeksploitasi kekayaan alam dalam melanggengkan cita-cita egoismenya.

Selebihnya, masih terlalu banyak kata dan kalimat yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan hakikat dan falsafah Pancasila itu. Artinya, ada ruang kosong antara tafsir normatif Pancasila dengan wujud praktik dan realitanya. Ruang kosong inilah yang menjadikan Pancasila pada posisi yang paradoksal. Mengandung nilai

kosmopolitan tetapi dipraktikkan secara komunitarian oleh sekelompok orang yang jiwa dan semangatnya tidak didasarkan pada nilai-nilai falsafah kehidupan keindonesiaan yang berbasis pada Pancasila.

PENU

Jika keadaan dan kenyataan di atas terus berlanjut, maka cita-cita Pancasila hanyalah sebagai angan utopis yang takkan berwujud nyata. Pada titik ini, *political will* dari segala pemangku kepentingan dan pemerintah adalah hal yang penting. Ibarat membersihkan seluruh tubuh kala mandi, air disiram mulai dari kepala, maka untuk menyelesaikan semua hal itu pemerintah sebagai “kepala” adalah aktor yang pertama dan utama.

Mengutip Buya Syafii Maarif (dalam Fauzi dan Panggabean, 2010), Pancasila sudah diterima sebagai dasar filosofi negara dengan penuh kesadaran. Tugas selanjutnya adalah menerjemahkan nilai-nilai luhur Pancasila itu ke dalam kenyataan kehidupan yang konkret, sesuatu yang masih jauh dari harapan kita semua. Cita-cita keindonesiaan harus didasarkan dan tidak terlepas dari nilai-nilai kosmopolitanisme yang dikandung Pancasila, tanpa terpasung oleh kepentingan kelompok dan golongan.

DAFTAR I

- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009)
- Ali-Fauzi, Ihsan dan Samsu Rizal Panggabean (peny.). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina, 2010)
- Cheah, Pheng. *Cosmopolitanism, Theory Culture Society* (Nottingham: Sage Publication, 2006)
- Gannaway, Adam. *What is Cosmopolitanisme?* (MPSA Conference Paper, 2009)
- Griffiths, Martin, dkk. *International Relations: The Key Concepts, Second Edition* (New York: Routledge, 2008)
- Hannerz, Ulf. *Two Face of Cosmopolitanism: Cultural and Politics*, Documentos CIDOB Dinamicas Interculturales Numero 7 (Barcelona: Fundacio CIDOB, 2006)
- Hidayat, Komaruddin (ed.). *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila* (Jakarta: Mizan, 2014)
- Malik, Nazaruddin dan Jamsari Djaeng. *Menanam Benih Menuju Indonesia Jernih* (Malang: UMM Press, 2009)
- Marsudi, Subandi Al. *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Pieterse, Jan Naderveen. *Globalization and Culture: Global Melange* (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2009)
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012)

Rachman, Budhy Munawar. *Islam dan Liberalisme* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011)

Suranto, Hanif dan P. Bambang Wisudo (eds.). *Wajah Agama di Media* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2010)

Tumanggor, Rusmin, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Prenadamedia, 2010)

Tantangan Pancasila dalam Tafsir Kosmopolitanisme

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ dkj.or.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%